



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 Nomor: 06 /PENG/PIM/RH.04/08/2017

Komisi Yudisial mengundang APINDO dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mengusulkan calon terbaik untuk menjadi hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
5. Sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
6. Berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela;
7. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) hukum;
8. Berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan
12. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial..

Pengusulan calon hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung dapat diajukan tanggal 29 Agustus s.d. 19 September 2017 dan ditujukan kepada KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA MAHKAMAH AGUNG. Usulan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 19 September 2017 (stempel pos) atau tanggal 19 September 2017 pukul 16.00 WIB bila diantar langsung, dengan melampirkan data-data sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung;
2. Surat pengusulan oleh organisasi buruh dan/atau organisasi pengusaha Indonesia;
3. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja;
8. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi;
10. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus serta anggota partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik;
11. Lembar penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
13. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial;
14. Pasphoto berwarna terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
5. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui website Komisi Yudisial RI www.komisiyudisial.go.id.

Jakarta, 14 Agustus 2017

Ketua



Prof. Dr. Abdul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

SURAT PENDAFTARAN HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MAHKAMAH AGUNG

Nomor :2017
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengusulan Calon Hakim *ad hoc*
Hubungan Industrial di Mahkamah
Agung

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim *ad hoc*
Hubungan Industrial di Mahkamah Agung
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jln. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini saya:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor tlp/HP :

bermaksud untuk mendaftar menjadi calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung. Alasan saya mendaftar adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung yang bersangkutan.

Demikian surat pendaftaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan

(nama lengkap dengan gelar)

SURAT PENGUSULAN CALON HAKIM AD HOC HI DI MAHKAMAH AGUNG

KOP SURAT INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENGUSUL

Nomor :2017
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengusulan Calon Hakim *ad hoc*
Hubungan Industrial di
Mahkamah Agung

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim *ad hoc*
Hubungan Industrial di Mahkamah Agung
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jln. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini (*nama lembaga pengusul*) mengusulkan calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Telp/HP

Adapun pertimbangan kami, karena yang bersangkutan memiliki kompetensi di hubungan industrial serta integritas, moralitas dan nurani yang baik untuk mengemban tugas sebagai hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administratif calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan dan
Cap instansi/lembaga pengusul

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :
Tempat dan Tgl. Lahir :
NIP* :
No. KTP :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah Tinggal (KTP) :
Alamat Surat menyurat :
Nomor Telepon Rumah/HP :
Alamat e-mail :
Profesi :
Instansi :
Alamat Instansi/Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Jabatan :

*) bagi PNS

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Fakultas	Universitas/Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	S1				
2.	S2				
3.	S3				
4.					

ANGGOTA KELUARGA

No	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Hubungan	Pekerjaan	Alamat
1.				Istri/Suami		
2.				Anak		
3.				Anak		
4.				Dst		

PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan	Instansi	TMT SK	No. SK	Tanggal SK	TMT Pelantikan/Pelaksanaan Tugas
1.						
2.						
3.						
dst						

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
4.		s/d.....
5.		s/d.....
6.		s/d.....
dst			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____, _____ 2017

Pas Photo Berwarna 4x6

Tanda tangan diatas materai Rp. 6000,-
(Nama Lengkap)

**SURAT PERNYATAAN
BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Pekerjaan terakhir : _____

Jabatan : _____

Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini saya menyatakan, telah bekerja selama tahun dalam bidang hubungan industrial, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PENGALAMAN DALAM BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	MASA JABATAN/KERJA
1		(Tanggal, Bulan, Tahun) s.d (Tanggal, Bulan, Tahun)
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan/perjanjian/kontrak/keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

KOP PENGADILAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA**

Pengadilan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Pekerjaan terakhir : _____

Jabatan : _____

Alamat (sesuai KTP) : _____

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2017

Nama
NIP.....

REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Nomor HP :
- e. Hubungan dengan calon :
- f. Lama hubungan dengan calon :

Memberikan rekomendasi kepada :

Terkait dengan integritas, kualitas, dan reputasi dengan penjelasan sebagai berikut:

I. INTEGRITAS

.....
.....
.....
.....

II. KUALITAS

.....
.....
.....
.....

III. REPUTASI

.....
.....
.....
.....

.....,2017
Nama Lengkap dan Tanda tangan pemberi
rekomendasi
(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung, maka saya bersedia melepaskan jabatan struktural dan jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)